



SUARA LAUT

Volume 2 : Hari Kemerdekaan

Refleksi Hari Kemerdekaan

Vol.2 Hari Kemerdekaan : Refleksi Hari Kemerdekaan

Editor

Luthfian Haekal

Design & Layout

Muhamad Arif
Fairuz Mahdiyyah

Penulis

Imam Trihatmadja
Muh Fachrin Apriyitno
Ferre Reza
Rusda Khoiruz

Jl. Jaha No.88 ABC, East Cilandak, Pasar
Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12560



DAFTAR ISI

01

Kata Pengantar dari Penginterupsi :
Membuka Pintu Kemungkinan Refleksi
Kenyataan “yang-ada”

04

Dari Data di Laut Hingga
Kebijakan di Meja Rapat

07

Sistem Bagi Hasil di Awak Kapal
Perikanan Muara Baru

10

Mengapa AKP Tak Kunjung
Sejahtera?

14

Singgah Sebelum Kembali
Melaut

16

Checkpoint: Administrasi
Sebelum Keberangkatan

17

Berita Kelautan : Tingkatkan Akses
Perlindungan Sosial di Pekalongan, DFW
Indonesia Luncurkan PROSPER

19

Berita Kelautan : Survei DFW: Nelayan
Kecil Masih Kesulitan Mengakses
Subsidi Solar

Kata Pengantar dari Penginterupsi

Membuka Pintu Kemungkinan Refleksi Kenyataan “yang-ada”

Luthfian Haekal
Human Rights Manager

“...Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa membikin kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada orang mau membikin kenyataan-kenyataan baru, maka ‘kemajuan’ sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia...”
Pramoedya Ananta Toer dalam “Rumah Kaca”

Pramoedya pernah menulis dalam Rumah Kaca: “...Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang...”. Melalui kalimat tersebut, Pram hendak bicara tentang kepasrahan kondisi batin manusia yang tidak mampu untuk mengubah dunia disekitarnya. Kenyataan tidak cukup hanya untuk diterima, tetapi harus ditantang, dipertanyakan, dan diubah. Acara seremonial tahunan yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus menjadi momentum untuk menerima kenyataan kondisi Indonesia sekaligus membuka peluang untuk membuat kenyataan-kenyataan baru. Seremonial 17 Agustus tidak hanya dilalui melalui acara pengibaran bendera merah putih, tetapi juga melalui refleksi untuk membuka kemungkinan-kemungkinan atas kenyataan baru.

Kenyataan tidak pernah netral. Ia adalah hasil saling silang dari berbagai jejaring kuasa. Kenyataan merupakan proses menyejarah yang terus menerus dikonstruksi berulang-ulang. Proses konstruksi kenyataan baru, hanya dimungkinkan jika terdapat refleksi. Manusia harus berefleksi terlebih dahulu untuk membuka pintu-pintu kenyataan yang baru. Tanpanya, manusia hanya akan berputar-putar di dalam kenyataan yang stagnan dan tidak berkembang -mungkin juga nyaman.

Oleh karenanya, zine ini hadir bukan sebatas artikulasi perayaan kenyataan yang ada, tetapi untuk meraba kemungkinan atas kenyataan yang lain. Sebab, kenyataan yang selama ini menyatu dalam diri kita tidak harus menjadi takdir. Ia bisa diganggu dan digeser. Tanpa keberanian mempertanyakan, kenyataan yang dihidupi hanya berjalan ditempat dan dengan nasib yang sama.

Zine “Suara Laut” yang diterbitkan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia berusaha untuk menggugat kenyataan yang ada di dalam dunia kelautan dan perikanan. Sesuai namanya, “Suara Laut” menyuarakan isu-isu yang berada di sekitar laut, baik pekerja di laut, pekerja darat yang menerima bahan dari laut, hingga laut sebagai kesatuan ekologis. Zine “Suara Laut” merupakan produk sebagai sarana kampanye mendukung advokasi yang telah dilakukan oleh DFW Indonesia dalam rangka perbaikan kesejahteraan bagi pekerja perikanan.



Setelah terbitan pertama Zine “Suara Laut” mengenalkan siapa saja pekerja perikanan dan kerentanan yang dialami, terbitan kedua akan membahas terkhusus kondisi yang dialami oleh pekerja perikanan. Tulisan pertama berasal dari Fachrin akan membahas tentang mekanisme bagi hasil yang selama ini dijalankan. Tulisan kedua berasal dari Rusda, seorang peneliti yang melakukan etnografi darat di Pelabuhan Nizam Zachman, Jakarta Utara tentang rezim perburuhan Awak Kapal Perikanan (AKP). Pada tulisan tersebut, Rusda membincangkan cuplikan singkat temuan-temuannya di lapangan. Selain tulisan, terbitan kedua Zine “Suara Laut” juga menghadirkan rubrik foto-esai karya Ferre, awak magang di DFW Indonesia tentang potret AKP yang tengah berlabuh di pelabuhan Nizam Zachman.

Melalui ketiga rubrik tersebut, DFW Indonesia hendak membuka ruang untuk mempertanyakan. Semenjak awal, Zine “Suara Laut” tidak dimaksudkan sebagai publikasi formal seperti laporan riset atau dokumen akademik. Zine “Suara Laut” adalah ruang untuk menyuarakan suara-suara dari pekerja perikanan. Ruang untuk menampilkan suara, bercerita, dan terkadang menggugat.

Harapannya, zine ini dapat menjadi pemantik keberanian untuk mempertanyakan kenyataan yang selama ini kita hidupi sembari mencari peluang membuka pintu-pintu alternatif yang mempertanyakan kenyataan “yang-ada”. Keberanian tersebut menjadi awal mula perlawanan. Setiap keberanian tumbuh dari refleksi yang mempertanyakan “yang-ada”.

Untuk menutupnya, saya mengutip lirik lagu dari Efek Rumah Kaca berjudul “Menjadi Indonesia”

Lekas bangun dari tidur berkepanjangan
Menyatakan mimpimu
Cuci muka biar terlihat segar
Merapikan wajahmu
Masih ada cara menjadi besar
Memudakan tuamu
Menjelma dan menjadi Indonesia

Lal salam,
Penginterupsi





Post



DFW Indonesia

@dfw_indonesia



nggak bisa yura, soalnya hak abk nggak lebih penting daripada ikannya :((

[Translate post](#)



Yura Yunita  @yurayunita · 28 Jul 24

Bisa?

18:35 · 01 May 25

 View post activity



Dari Data di Laut Hingga Kebijakan di Meja Rapat

Pernahkah Anda mencoba menjelaskan konsep 'keberlanjutan ekosistem' kepada seseorang yang hari itu hanya ingin memastikan keluarganya bisa makan? Di situlah pekerjaan kami dimulai. Saya, sebagai *Program Director*, seringkali berada di tengah-tengah dua dunia tersebut: dunia idealis di mana laut harus lestari, dan dunia nyata di mana asap dapur harus tetap mengepul. Misi kami di **Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia** adalah menjadi jembatan antara keduanya, memastikan bahwa menjaga laut tidak berarti mengorbankan perut nelayan, perut pekerja yang ada di industri perikanan, dan sebaliknya. Ini adalah seni menyeimbangkan yang rumit, terkadang membuat frustrasi, tapi selalu kami kerjakan dengan semangat dan sepenuh hati.

Kami bukan cenayang yang bisa menebak masalah di lautan dari balik meja ber-AC. Setiap program kami lahir dari data yang solid, dari riset yang terkadang membuat kami harus berpanas-panasan di atas kapal, bermandikan keringat di lapangan atau begadang menganalisis angka dan hasil temuan. Kami memetakan zona rawan, menginvestigasi dampak sosial ekonomi dari praktik penangkapan yang merusak, dan mencoba memahami pola pikir setiap pemangku kepentingan. Anggap saja ini pekerjaan intelijen kami; tanpa peta 'pertempuran' yang akurat, strategi sebaik apa pun hanya akan menjadi angan-angan yang mahal.

Namun, data di atas kertas tidak akan mengubah apa pun jika hanya berakhir di laci meja atau bahkan di media penyimpanan digital.



Foto: Nas / DFW Indonesia

Di sinilah babak selanjutnya dimulai: advokasi kebijakan. Ini adalah bagian di mana kami mengetuk pintu-pintu para pengambil keputusan, berbekal laporan tebal dan segudang rekomendasi. Terkadang prosesnya terasa seperti maraton yang tak ada habisnya, membutuhkan kesabaran setebal kamus dan bercangkir-cangkir kopi yang tak terhitung jumlahnya. Kami hadir bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kritis pemerintah yang membawa suara dan realitas dari lapangan, dengan sedikit humor sarkastik jika diperlukan untuk mencairkan suasana. Tentu saja, solusi terbaik sering kali tidak datang dari menara gading di Jakarta, melainkan dari warung kopi di pesisir. Inilah mengapa pilar utama pekerjaan kami adalah pemberdayaan masyarakat. Kami duduk bersama para nelayan, para pekerja perikanan, para anak buah kapal, mendengar keluh kesah mereka—bukan sebagai objek program, tapi sebagai pakar sejati lautan. Dari obrolan panjang itulah lahir program-program pelatihan, pengenalan alat tangkap ramah lingkungan, pengenalan resiko kerja, pengenalan hak buruh, hingga penguatan kelembagaan lokal. Kami percaya, penjaga laut terbaik adalah mereka yang hidup dan matinya bergantung pada laut itu sendiri.

Jika dibayangkan, pekerjaan kami ini seperti merakit sebuah mesin mobil balap yang kompleks. Riset adalah cetak birunya, advokasi adalah pelumas yang memastikan roda birokrasi berputar, dan pemberdayaan serta penyadartahuan masyarakat adalah bahan bakar yang membuatnya terus berjalan. Keempat elemen ini tidak bisa dipisahkan. Tanpa riset, advokasi kami ompong. Tanpa advokasi, temuan kami menguap. Dan tanpa keterlibatan komunitas, semua perubahan hanya akan bersifat sementara dan dangkal. Tugas kami adalah memastikan semua komponen ini terpasang dengan pas dan bekerja secara harmonis.

Pada akhirnya, apa yang kami impikan? Sederhana saja: laut yang sehat, nelayan dan pekerja perikanan yang berdaya, serta industri perikanan yang adil dan berkelanjutan. Sebuah visi yang mungkin terdengar terlalu megah, namun setiap langkah kecil yang kami ambil di lapangan membawa kami lebih dekat ke sana. Kami tidak memegang semua jawaban, tapi kami selalu punya kursi tambahan dan kopi panas untuk siapa saja yang mau ikut berpikir dan bekerja bersama kami. Karena masalah sebesar ini jelas tidak bisa diselesaikan sendirian.

Imam Trihatmadja
Direktur Program DFW Indonesia

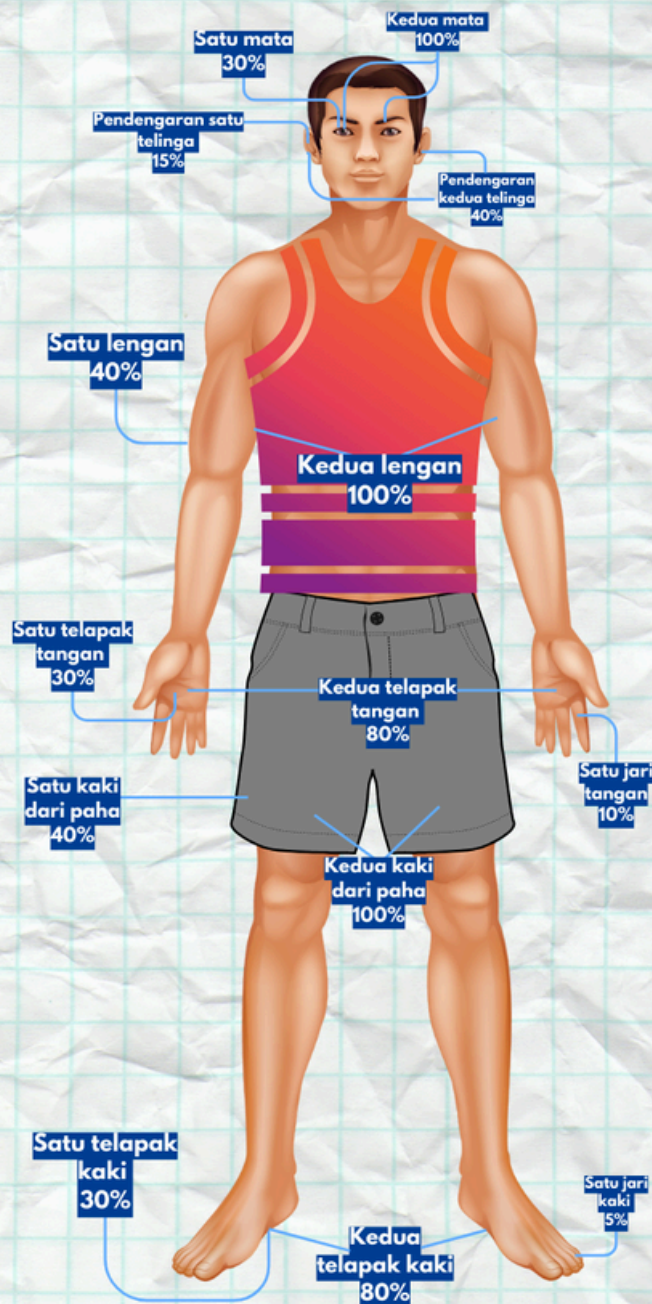


Santunan ABK Perikanan

berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2021 Pasal 187

Cacat Tetap: Rp150.000.000

Rp150.000.000 x angka% dari bagian tubuh yang cacat



Meninggal dunia:

Paling sedikit Rp100.000.000 jika karena sakit

Paling sedikit Rp150.000.000 jika karena kecelakaan kerja

Esai

Sistem Bagi Hasil di Awak Kapal Perikanan Muara Baru

Muh Fachrin Apriyitno
Fasilitator, DFW Indonesia

Potensi perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memberikan peluang adanya produksi perikanan yang berdampak pada tingkat pendapatan Awak Kapal Perikanan (AKP). Terdapat dua mekanisme pengupahan bagi AKP, yaitu bulanan dan bagi hasil. Berkaitan dengan bagi hasil, mekanisme yang dijalankan berdasarkan kesepakatan antara masing-masing kelompok nelayan berdasarkan pemilik kapal.

Menurut UU No. 16 tahun 1964 pasal 1 ayat 1 bahwa perjanjian hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan antara nelayan pemilik dan Awak Kapal Perikanan, dan masing-masing menerima bagian dari hasil usaha menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya. Namun pada kondisinya, Anak Buah Kapal (ABK) sebagai nelayan hanya menerima bersih dan sulit untuk menyampaikan keinginan memperoleh kenaikan persentase bagi hasil. Pola kerjasama antara pemilik dan ABK pada masyarakat nelayan didasarkan atas kebiasaan dan Jenis alat penangkapan, setempat dan sangat sulit dihindari karena berdasarkan adat kebiasaan (Brenner, 1998). Hal tersebut yang tentunya dapat menghambat perubahan ekonomi masyarakat nelayan (Kusnadi, 2009).

Keragaman ketentuan sistem bagi hasil pada awak kapal perikanan Pelabuhan Nizam Zachman disesuaikan dengan jenis alat tangkap yang digunakan. Pada kondisi ini, nelayan khususnya ABK tidak memiliki hak untuk ikut memberikan masukan terkait penentuan besaran bagi hasil. Dalam beberapa kasus, pemilik kapal membuat penawaran yang dipandang menarik bagi calon ABK agar bersedia bekerja di kapalnya. Penawaran tersebut seperti uang target, uang kontrak yang diberikan sukarela oleh pemilik kapal, pinjaman *fishing ground*, serta uang kasbon yang variatif antara 5 sampai 10 juta per kapal.

Selain keragaman sistem bagi hasil yang diberlakukan bergantung kepada pemilik kapal, masalah lain yang kerap dihadapi oleh ABK adalah ketidaksesuaian kontrak. ABK kerap menerima hasil yang berbeda dengan dokumen yang ia tandatangani. Selain itu, mekanisme pengupahan bulanan cenderung masih minim diberlakukan. Kapal cumi, kapal dengan jenis alat tangkap gill net, dan rawai tuna menggunakan mekanisme upah bulanan. Selain kapal di atas, ABK menggunakan skema bagi hasil.

Untuk mengatasi masalah di atas, memerlukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada AKP. Sistem bagi hasil perikanan tangkap yang telah diatur di dalam UU No. 16 tahun





Photo: Fai/ DFW Indonesia

Ketiga, menyisihkan satu persen dari hasil pendapatan nelayan dan ABK untuk kepentingan pinjaman awak kapal yang dapat dijadikan modal simpan pinjam pada musim paceklik. Modal tersebut diatur oleh nelayan dan ABK yang menjadi satu kelompok nelayan. Keempat, pendapatan awak kapal yaitu nahkoda dan ABK harus disampaikan kepada istri sah atau jika belum menikah diberikan kepada orang tua yang bertanggung jawab. Kondisi tersebut merupakan antisipasi untuk mencegah pemborosan serta kondisi paceklik. Tujuan lain dari hal tersebut adalah pembiasaan para nelayan agar dapat memprioritaskan kebutuhan utama.

1964 memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat. Terdapat empat (4) poin yang tidak diperkenankan dilakukan oleh pemilik, yaitu, pertama, pemilik yang menyediakan perlengkapan operasional melaut tidak boleh mengambil keuntungan dari item-item perlengkapan. Kedua, perlengkapan yang disediakan akan dibayar sesuai dengan harga beli. Apabila pemilik merupakan penjual perlengkapan biaya operasional tersebut, pemilik harus menggunakan harga yang sama kepada konsumen lain yang bukan nelayan.



Photo: Fai/ DFW Indonesia





Esai

Mengapa AKP Tak Kunjung Sejahtera?

Rusda Khoiruz Zaman
Researcher DFW Indonesia

Iming-iming manis dan janji kesejahteraan kerap menarik orang memutuskan untuk menjadi Awak Kapal Perikanan (AKP). Namun, di balik iming-iming dan janji kesejahteraan itu, ada rantai belenggu dan eksploitasi yang tersembunyi dan tak kasat jepretan kamera. Belenggu dan eksploitasi tersebut bahkan langgeng dan semakin mapan dalam jangka waktu yang sangat lama seolah tak ada yang menyadarinya. Bahkan, eksploitasi yang mapan semakin lama dianggap kondisi yang sebagaimana mestinya dan sebagaimana adanya.

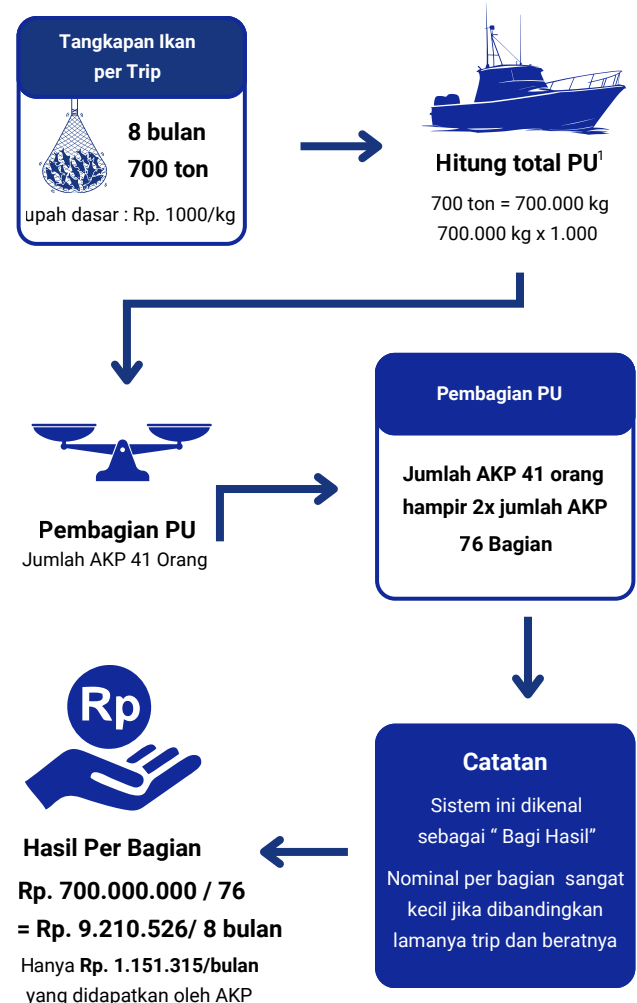
Saya kerap bertemu dengan AKP yang bahkan sudah bekerja puluhan tahun namun kehidupannya masih jauh dari kata sejahtera. Sebagai contoh AKP yang bekerja di atas kapal dengan alat tangkap pukat cincin pelagis besar di Pelabuhan Nizam Zachman. Istilah kultural untuk menyebut kapal ini di antara AKP adalah kapal cakalang. Lama melaut kapal cakalang rata-rata adalah 8 bulan dan kadang masih akan diperpanjang lagi jika hasil tangkapan dirasa perusahaan/pemilik kapal belum menutup "biaya perbekalan".

Di Nizam Zachman, sistem pengupahan kapal cakalang umumnya menggunakan sistem bagi hasil. Namun, istilah bagi hasil sebagaimana yang lumrah khalayak kenal, sebenarnya bukan bagi hasil murni melainkan berbasis produksi (*piece-rate wage*). Karakteristik utamanya adalah buruh tidak menerima gaji bulanan tetap, tetapi akan diupah berdasarkan hasil tangkapan ikan yang sejak awal sudah ditentukan harganya oleh perusahaan.



Memproblematisir Besaran Bagi Hasil

Sistem Bagi Hasil Upah AKP di Kapal Cakalang



¹PU Istilah yang digunakan AKP untuk merujuk pada bagian bersih sebelum dibagi menjadi beberapa bagian

Sebagai gambaran, dalam 1 kg tangkapan ikan jaring, AKP akan mendapatkan Rp. 1.000. Jika dalam satu kali trip selama 8 bulan kapal dapat membawa 700 ton, katakanlah, maka uang PU¹ yang harus dikeluarkan (Rp. 1000/kg x 700 ton) oleh perusahaan untuk mengupah seluruh AKP adalah Rp. 700.000.000. Total PU tersebut masih harus dibagi lagi menjadi sekitar hampir 2 x jumlah keseluruhan AKP yang ada di atas kapal. Katakanlah ada sebanyak 41 AKP di atas satu kapal cakalang, total PU tersebut biasanya akan dibagi ke 76 bagian (Rp. 700.000.000 : 76 = Rp. 9.210.526). Maka, satu bagian dari total seluruh PU tersebut hanya Rp. 9.210.526 selama delapan bulan melaut. Berdasarkan angka kasar tersebut, jika menggunakan ukuran pengupahan bulanan, ABK hanya mendapatkan upah sekecil Rp. 1.151.315 per bulan.

Angka 76² bagian itu didapatkan dari hasil total penjumlahan seluruh bagian AKP yang berada di atas kapal dan bagian untuk aktor di darat yang tidak ikut melaut. Aktor di atas kapal meliputi ABK biasa, Wakil Kapten, Kapten, dan berbagai jabatan pembagian kerja. Apabila dijumlahkan, terdapat sekitar 63 bagian yang dibagikan kepada seluruh AKP yang berada di atas kapal dengan bagian yang berbeda-beda. Sementara, sisa 10 lebih bagian diserahkan kepada aktor di darat di antaranya pengurus, tukang *service* kapal hingga dikonversi sebagai upah bagi para penjaga kapal ketika kapal sedang berlabuh/perbaikan.

Penjelasan di atas merupakan gambaran secara garis besar pengaturan upah bagi hasil AKP di kapal cakalang. Selain mendapatkan bagian bagi hasil, AKP juga didorong untuk mencari premi³ pribadi dengan cara memancing ikan di luar jam kerja. Jam kerja kapal cakalang hanya satu kali sehari, yaitu pagi sekitar jam 5 hingga jam 10-12 siang, tergantung volume tangkapan ikan di jaring. Di luar jam kerja tersebut, AKP biasanya akan berlomba-lomba memancing untuk mendongkrak penghasilan mereka di akhir.

Berbeda dengan ikan jaring, harga ikan pancingan pribadi AKP dihargai bervariasi. Ikan *cong*⁴ dihargai Rp. 5.500/kg. Sementara tuna, marlin, meka, tenggiri, cumi dan ikan-ikan demersal⁵ biasanya akan dihargai kurang lebih Rp. 10.000/kg. Dalam satu kali trip, hasil pancingan pribadi AKP sangat bervariasi, mulai dari 1 ton hingga 3 ton, dan sangat bergantung dengan rajin tidaknya mereka memancing.

Pengejaran bonus dengan pancingan pribadi tersebut menjadi semacam kompetisi di atas kapal di mana AKP didorong agar berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil pancingan pribadi sebanyak mungkin untuk selanjutnya dijual ke perusahaan. Hasil ikan pancingan tak boleh dijual ke luar dengan alasan bahwa AKP sudah ditumpangi kapal oleh perusahaan. Saya sering mendengar obrolan AKP kapal cakalang di warung kopi bahwa sebenarnya yang memecut semangat mereka untuk bekerja adalah premi pancingan pribadi ketimbang menjaring ikan.

“ Di luar jam kerja, AKP biasanya akan berlomba-lomba memancing untuk mendongkrak penghasilan mereka.

Sebagai orang yang kerja di darat, mungkin kita familiar dengan sistem kerja yang dihitung sebagai bonus dari perusahaan untuk mengkompensasi kelebihan jam kerja kita. Pancingan pribadi pada dasarnya tidak berbeda dengan jam lembur AKP. Yang membedakannya adalah, di tengah laut, kelebihan jam kerja sulit dihitung lantaran wilayah privat kehidupan ABK dan tempat kerjanya menjadi satu padu sehingga kompensasi yang diberikan hanya didasarkan pada hasil tangkapan mereka masing-masing.

Bagian yang tak disadari namun cukup bisa dipahami mengapa AKP berlomba mengejar premi pancingan pribadi lantaran perusahaan/pemilik kapal menetapkan bagian bagi hasil ikan jaring hanya Rp1000. Dalam mengejar premi pancingan, seringkali ABK harus bekerja 14 jam lebih dalam sehari dengan hasil tak menentu.

¹PU Istilah yang digunakan AKP untuk merujuk pada bagian bersih sebelum dibagi menjadi beberapa bagian

²Angka 76 tidak lah pasti, tergantung pada hitungan yang dipakai oleh kapten.

³Bonus yang didapatkan AKP dari hasil pancingan pribadi.

⁴Istilah kultural untuk menyebut ikan cakalang, *baby tuna*, tongkol, lemadang dan lain-lain.

⁵Ikan demersal adalah ikan dasar air yang hidup dan makan di dasar laut.

Kasbon sebagai Mekanisme Kontrol

Di luar pengaturan harga ikan hasil jaring dan pancingan pribadi, AKP juga dibebani oleh kasbon kontrak⁶ yang diberikan perusahaan di awal sebagai uang muka yang harus dilunasi di akhir trip. Di antara berbagai kapal dengan alat penangkap yang lain, kapal cakalang dikenal sebagai salah satu yang menawarkan kasbon kontrak tertinggi sebelum *lepas tali*.⁷ Besarannya bisa bervariasi, mulai dari 6 hingga 10 juta, tergantung jabatan dan sudah berapa kali AKP ikut kapal tersebut.

Di samping kasbon kontrak, perusahaan/pemilik kapal juga menerapkan sistem kasbon grosir bagi AKP selama melaut. Melalui skema kasbon grosir, perusahaan/pemilik kapal melepas tanggung jawab reproduksi sosial para buruhnya yang mestinya ia tanggung. Skema kasbon grosir justru menjadi lahan bisnis bagi perusahaan karena harga barang yang mereka jual bisa jauh lebih mahal ketimbang di darat. Jadi, seluruh kebutuhan sehari-hari AKP selain makan 2 kali sehari seperti roti, jajanan, makanan ringan, mie, minuman berperisa dan lain sebagainya, akan dihitung sebagai hutang. Dalam beberapa kasus, kasbon grosir AKP bahkan bisa mencapai 8 juta dalam sekali trip. Komponen kasbon grosir terbesar biasanya ada pada rokok, yang dalam satu kali trip AKP bisa hampir menghabiskan 6 juta bahkan lebih.

Lama melaut juga menjadi titik krusial yang memastikan eksploitasi perusahaan/pemilik kapal bisa berlangsung ekstensif. Operasi kapal perikanan yang mencapai 8 bulan bahkan lebih membuat kondisi AKP sangat rentan. Mereka tidak bisa mengakses informasi apapun bahkan sekedar berkomunikasi dengan keluarga. Di tengah kondisi kerja yang isolatif seperti itu, AKP masih harus dibebankan biaya reproduksi sosial yang mesti mereka tanggung sendiri. Perusahaan/pemilik kapal lepas tangan karena dari awal AKP diandaikan sebagai nelayan mandiri. Perusahaan/pemilik kapal sebagai penyedia (*provider*) alat-alat produksi, sementara buruh AKP sebagai pihak mandiri yang menjalankannya alih-alih dicukupi seluruh kebutuhannya sebagai kompensasi. Konsekuensinya, makin lama melaut, besaran kasbon akan semakin membengkak.

Dari penggambaran singkat di atas, sudah tahu, kan, mengapa AKP yang bahkan sudah bekerja puluhan tahun namun kehidupannya masih jauh dari kata sejahtera?

⁶ Kasbon kontrak adalah uang pinjaman yang diberikan oleh bos/perusahaan sebagai uang muka sebelum AKP melaut. Dalam beberapa kasus, biasanya perusahaan berlomba-lomba memberikan tawaran kasbon yang besar untuk menarik minat AKP.

⁷ Istilah untuk menyebut berlayar.



GLOBAL CLIMATE STRIKE ■ 全球氣候罷課 ■ MOVILIZACIÓN MUNDIAL POR EL

MOVILIZACIÓN MUNDIAL POR EL CLIMA ■ 全球氣候罷課 ■ GLOBALER KLIMASTREIK ■ GRÈVE MONDIALE ■

CLIMA ■ GLOBALER KLIMASTREIK ■ GRÈVE MONDIALE POUR LE CLIMAT ■ JEDA UNTUK IKLIM ■ MOBILI-

KATANYA GAJI 10 JUTA

PULANG MALAH MEMBAWA HUTANG

ZACÃO GLOBAIS PELO CLIMA ■ グローバル気候マーチ ■ GLOBAL CLIMATE STRIKE

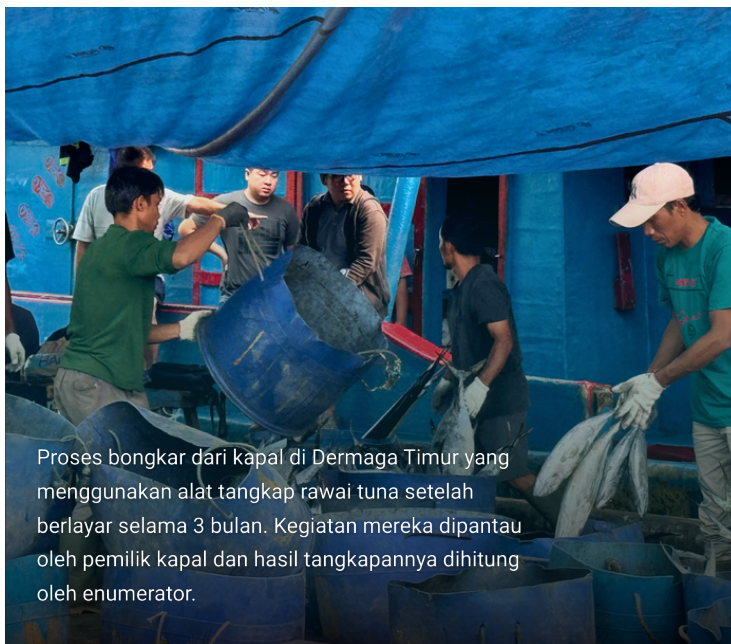
Foto - Esai

Singgah Sebelum Kembali Melaut

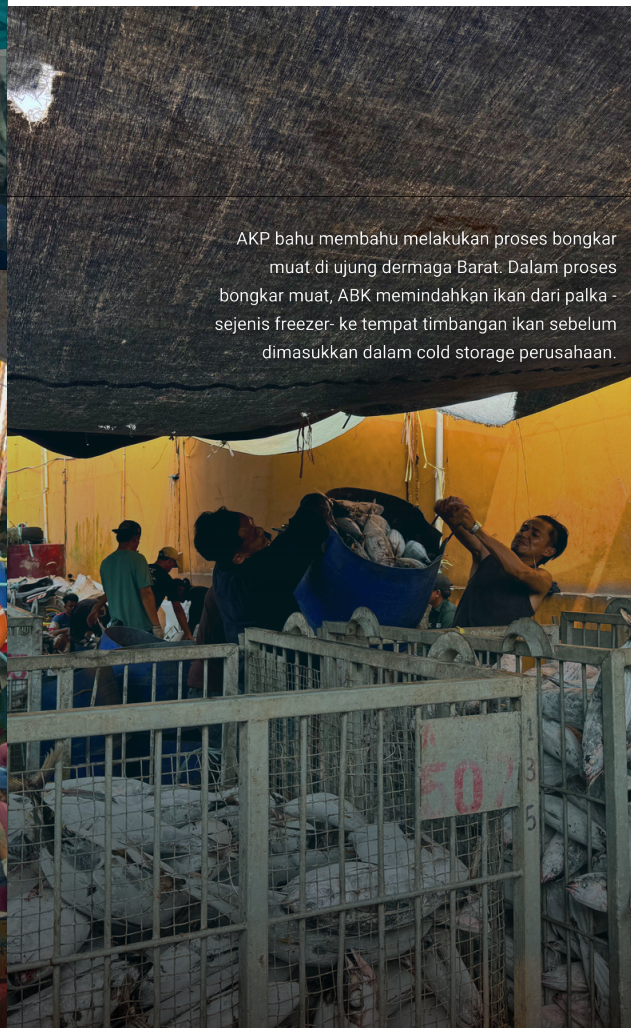
Ferre Reza

Etnographer Intern, DFW Indonesia

Aktivitas Bongkar Muat



Proses bongkar dari kapal di Dermaga Timur yang menggunakan alat tangkap rawai tuna setelah berlayar selama 3 bulan. Kegiatan mereka dipantau oleh pemilik kapal dan hasil tangkapannya dihitung oleh enumerator.

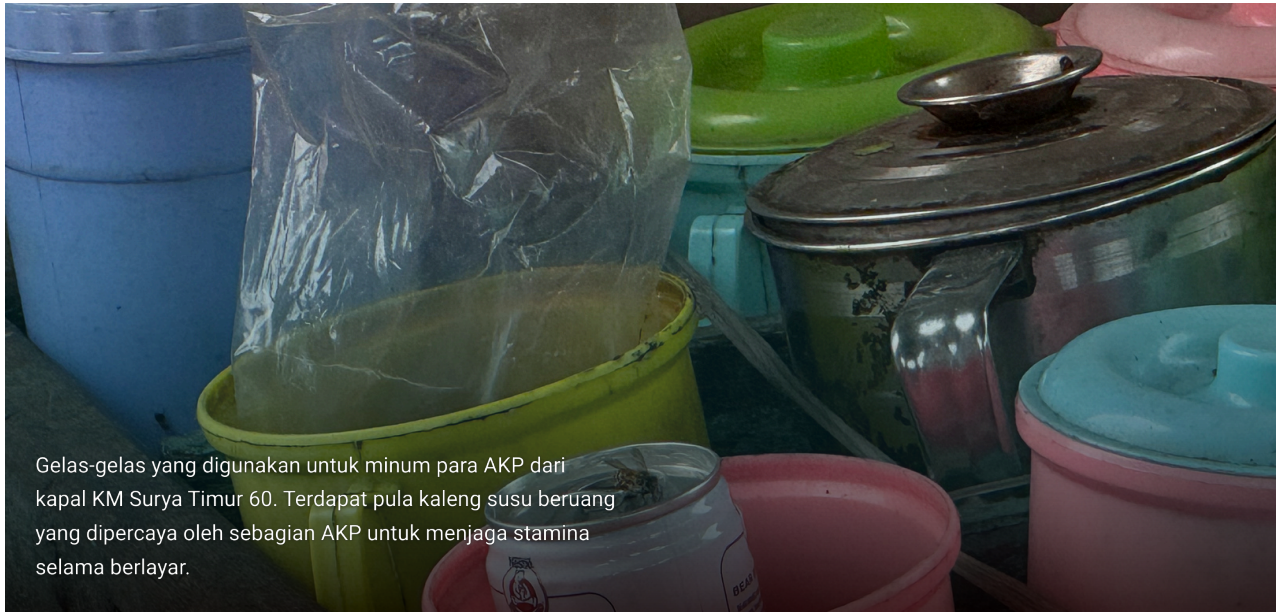


AKP bahu membahu melakukan proses bongkar muat di ujung dermaga Barat. Dalam proses bongkar muat, ABK memindahkan ikan dari palka - sejenis freezer - ke tempat timbangan ikan sebelum dimasukkan dalam cold storage perusahaan.

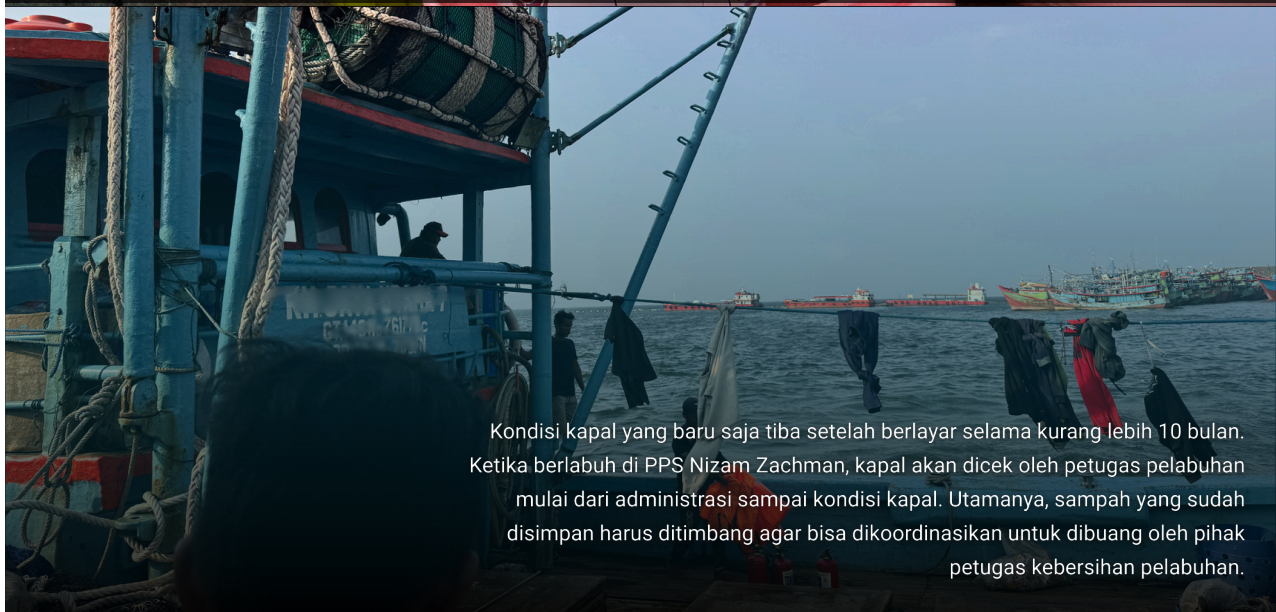
Seluruh foto yang diambil menggambarkan proses produksi perikanan yang dilakukan di pelabuhan Nizam Zachman, Jakarta Utara.

Foto-foto tersebut kiranya dapat menggambarkan salah satu kondisi dari rantai produksi perikanan yang selama ini menjadi bahan konsumsi masyarakat Indonesia atau bahkan dunia. Namun, tentunya, kondisi pekerjaan seperti ini memang begitu jarang tersorot dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi Kapal



Gelas-gelas yang digunakan untuk minum para AKP dari kapal KM Surya Timur 60. Terdapat pula kaleng susu beruang yang dipercaya oleh sebagian AKP untuk menjaga stamina selama berlayar.



Kondisi kapal yang baru saja tiba setelah berlayar selama kurang lebih 10 bulan. Ketika berlabuh di PPS Nizam Zachman, kapal akan dicek oleh petugas pelabuhan mulai dari administrasi sampai kondisi kapal. Utamanya, sampah yang sudah disimpan harus ditimbang agar bisa dikoordinasikan untuk dibuang oleh pihak petugas kebersihan pelabuhan.

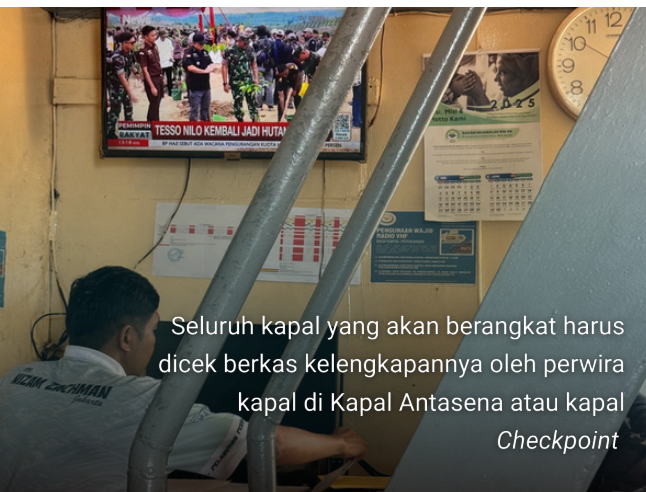


Foto - Esai

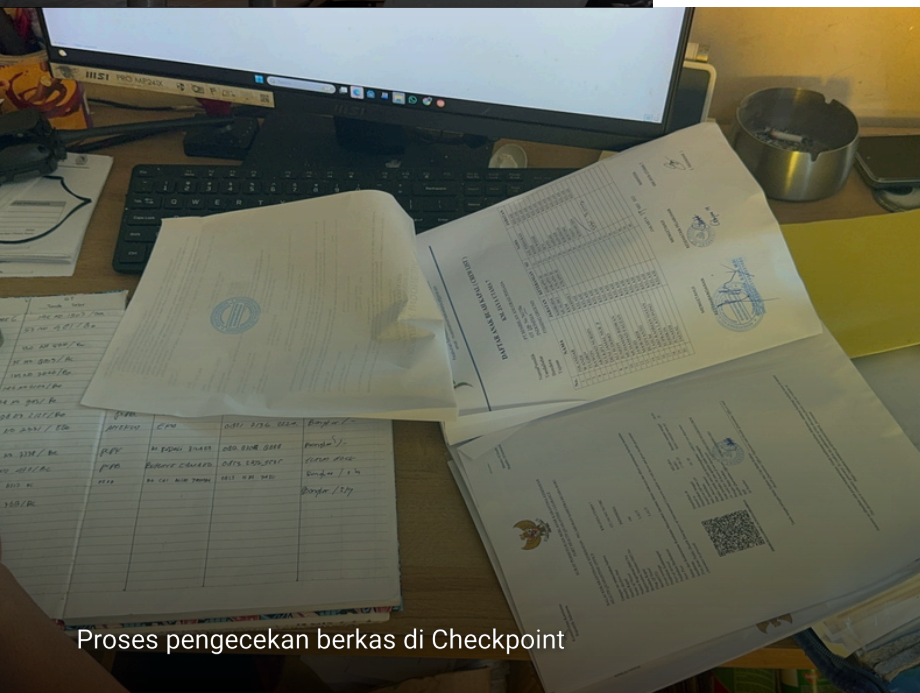
Checkpoint: Administrasi Sebelum Keberangkatan

Ferre Reza

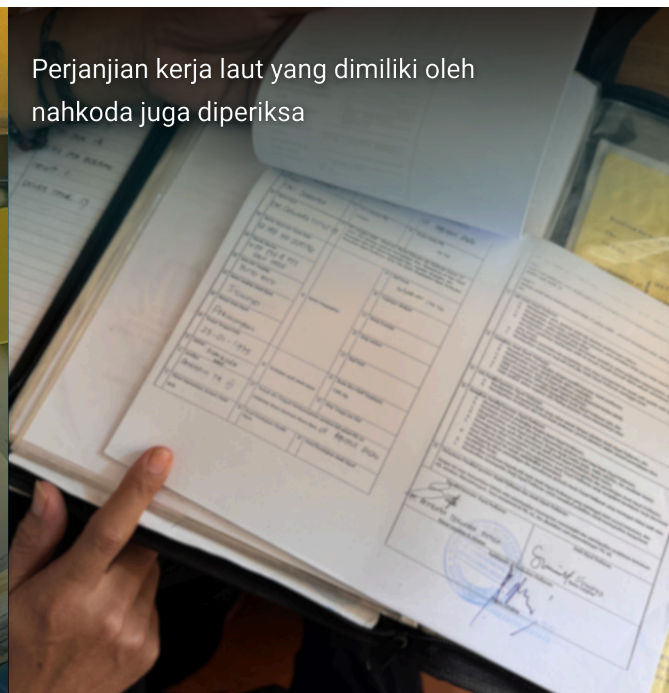
Ethnographer Intern, DFW Indonesia



Seluruh kapal yang akan berangkat harus dicek berkas kelengkapannya oleh perwira kapal di Kapal Antasena atau kapal Checkpoint

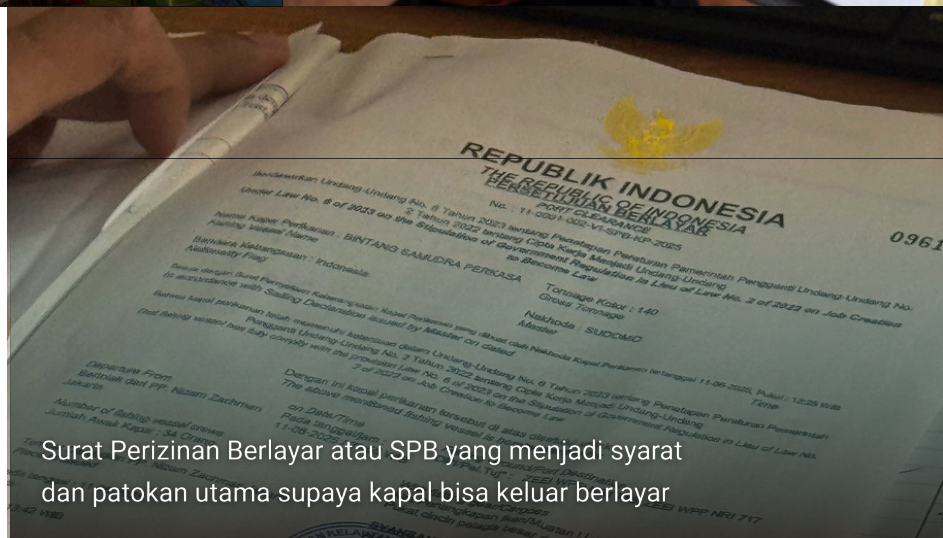


Proses pengecekan berkas di Checkpoint



Perjanjian kerja laut yang dimiliki oleh nahkoda juga diperiksa

Pengecekan Sertifikat dan Berkas



Surat Perizinan Berlayar atau SPB yang menjadi syarat dan patokan utama supaya kapal bisa keluar berlayar

Berita Kelautan

Tingkatkan Akses Perlindungan Sosial di Pekalongan, DFW Indonesia Luncurkan PROSPER

Kabupaten Pekalongan telah menjadi salah satu daerah di Indonesia yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Sebagai wilayah pesisir yang berada di atas tanah aluvial yang lunak, Kabupaten Pekalongan terancam oleh kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global yang menyebabkan banjir rob dan abrasi pantai. Dampak bencana iklim telah memengaruhi sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat pesisir Pekalongan menyebabkan sebagian besar beralih profesi menjadi pekerja migran demi mempertahankan pendapatan keluarga. Pekerja migran perikanan, dalam hal ini seperti Awak Kapal Perikanan (AKP), sangat rentan dieksploitasi melalui perekrutan yang tidak transparan, jam kerja panjang, perlindungan minim, upah yang tidak adil, serta lemahnya jaminan perlindungan sosial.

Sebagai respons masalah sosial yang hadir akibat perubahan iklim di pesisir Kabupaten Pekalongan, DFW Indonesia melaksanakan Program Protecting Rural & Ocean-dependent Societies through Participatory Economic Resilience (PROSPER). Program tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial serta mengenalkan mata pencaharian alternatif bagi komunitas yang terdampak perubahan iklim khususnya Awak Kapal Perikanan (AKP) dan keluarganya, nelayan dan pembudidaya perikanan skala kecil, masyarakat pengolah hasil perikanan, serta masyarakat miskin pesisir lainnya. PROSPER berfokus pada peningkatan akses terhadap sistem perlindungan sosial serta pengembangan alternatif penghidupan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan komunitas pesisir.

PROSPER dilaksanakan di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah dengan tiga (3) desa pesisir sebagai percontohan, yaitu Desa Tratebang, Desa Api-API, dan Desa Pecakaran. Tiga wilayah tersebut merupakan daerah pesisir yang terdampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Dampak dari perubahan iklim membuat tiga daerah tersebut mengalami kenaikan permukaan air laut, banjir rob, abrasi pantai, dan risiko kehilangan sumber penghidupan. Desa-desa tersebut juga menjadi pemasok tenaga kerja bagi industri perikanan tangkap pada kapal perikanan di berbagai wilayah, seperti Muara Baru, Tegal, Juwana, Cilacap, Benoa dan wilayah lainnya.

Sebagai pengenalan PROSPER, DFW Indonesia mengadakan acara sosialisasi berjudul “Peningkatan Informasi Akses Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Pesisir”. Kegiatan tersebut membahas jenis-jenis program perlindungan sosial, khususnya yang sudah dirancang oleh pihak pemerintah daerah. Bertempat di balai pertemuan desa, acara sosialisasi PROSPER dihadiri oleh pihak-pihak keluarga Awak Kapal Perikanan (AKP), nelayan, petambak, pekerja sektor perikanan lain, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pekalongan. Acara tersebut sekaligus menjadi upaya menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, pihak swasta, pemangku kepentingan tingkat pedesaan, dan masyarakat desa.

Pemerintah telah mengelola berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial yang terdistribusi pada berbagai sektor namun seringkali berjalan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, PROSPER hadir sebagai upaya membangun kolaborasi dan sistem yang terpadu dalam memberikan akses informasi terkait program perlindungan sosial bagi masyarakat pesisir sektor perikanan.

“Program PROSPER membangun pendekatan untuk memadukan berbagai program perlindungan sosial baik yang dikelola pemerintah, badan usaha (swasta) maupun masyarakat perorangan sehingga dapat lebih optimal dan tepat sasaran kepada masyarakat,” terang Nabiyya Perennia, Koordinator Program PROSPER, DFW Indonesia.

PROSPER mendapatkan sambutan baik dari ketiga kepala desa yang menjadi daerah percontohan program. Pronisa selaku Kepala Desa Tratebang berharap PROSPER dapat membantu masyarakat menerima perlindungan sosial yang layak. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Abdul Muis selaku Sekretaris Desa Pencakaran. Ia berkata bahwa PROSPER dapat membantu penjangkauan informasi perlindungan sosial bagi masyarakat desa yang selama ini terhambat aksesnya.

Berkaitan dengan akses perlindungan sosial, Qomarudin, Kepala Desa Api-API menegaskan bahwa pemerintah desa telah mengusulkan nama-nama masyarakat yang layak menerima program perlindungan sosial. Namun, ia menyatakan bahwa saat ini kepala desa hanya menjadi pelaksana tingkat bawah. Menurutnya, pengambilan keputusan pasca proses verifikasi lapangan (*ground check*) yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial terkadang tidak sesuai dengan data yang diusulkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa.

Menanggapi hal tersebut, Muhlisinalahudin selaku perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa data yang ada di daerah telah diverifikasi oleh Pusat. Pemerintah Pusat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) telah melakukan verifikasi data yang terhimpun di Kementerian Sosial dan Kementerian lainnya. “Proses ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh negara tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” terangnya.

Selain data yang terkadang tidak sesuai dengan usulan Musrenbang desa, Musnafik selaku keluarga AKP turut menyoroti asuransi bagi AKP yang disediakan oleh pemerintah. Baginya, selama ini perlindungan sosial bagi AKP yang melaut selama berbulan-bulan hingga sembilan bulan masih belum ada kejelasan. Fahrudin, Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pekalongan menyampaikan upaya perlindungan sosial kepada nelayan dilakukan melalui penyediaan asuransi nelayan melalui BPJS Tenaga Kerja dengan nilai premi sebesar Rp.38.000 per bulan. “Dengan adanya jaminan sosial, dapat membantu mengurangi risiko kerentanan yang dihadapi nelayan selama bekerja di laut,” terang Fahrudin.



Foto: Dzulfiusi Rafif/ DFW Indonesia

Berita Kelautan

Survei DFW: Nelayan Kecil Masih Kesulitan Mengakses Subsidi Solar

Indonesia per tahun 2022 memiliki 2.401.540 populasi nelayan dimana per 2023 85% dikategorikan sebagai nelayan kecil. Nelayan kecil bergantung pada ketersediaan BBM untuk kegiatan melaut. Namun, nelayan masih kesulitan mengakses subsidi BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT/Solar). Terlebih, sejak naiknya harga BBM di 2022 turut berimbas pada menurunnya Nilai Tukar Nelayan selama periode 2022-2025.

DFW Indonesia telah melaksanakan Ekspose Hasil Survei Akses Nelayan Kecil Terhadap Subsidi Solar. Survei ini telah dilaksanakan sejak 8 Mei – 10 Juli secara luar jaringan (*luring/offline*) di beberapa titik di Indonesia antara lain: Denpasar, Kabupaten Kepulauan Aru, Baubau, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pekalongan, Bitung, dan Jakarta Utara. DFW Indonesia melakukan survei kepada 184 nelayan kecil, dimana 87,5% responden telah melaut selama 16-20 tahun dengan menggunakan kapal dengan ukuran kurang dari 6GT.

Survei tersebut menunjukkan sekitar 66,3% responden tidak menerima BBM subsidi. Responden membeli BBM melalui pengecer atau peran middleman lainnya dan hanya sekitar 25% responden yang membeli di SPBU Khusus Nelayan (SPBN). Kondisi ini turut didukung dengan temuan bahwa meskipun mereka mengetahui adanya SPBN, mereka seringkali tidak tahu ketersediaan jumlah BBM subsidi di SPBN, atau bahkan ketersediaannya seringkali kosong. Disisi lain, 75% responden menyatakan bahwa jumlah BBM subsidi yang disediakan cenderung tidak mencukupi kebutuhan melaut mereka. Dengan intensitas melaut 21-25 kali dalam sebulan, mereka biasanya membutuhkan 5-30 liter BBM setiap melaut. Keterbatasan jumlah BBM subsidi ini membuat 41,8% responden tidak melaut lebih dari 5 kali dalam sebulan.

Pengecer berperan cukup dominan sebagai perantara aksesibilitas BBM untuk nelayan. Hal ini didukung oleh temuan bahwa meskipun jarak SPBN ke lokasi nelayan tergolong dekat, jumlah ketersebaran SPBN yang minim menyebabkan banyak nelayan harus antri lebih lama dari biasanya. Terlebih, 78,3% nelayan harus membayar lebih dari Rp6.800 per liter untuk membeli BBM. Sehingga, nelayan paling tidak harus mengeluarkan uang lebih dari Rp2.000.000 per bulan hanya untuk membeli BBM subsidi untuk mereka pergi melaut yang cukup memberatkan mereka. “Nelayan kecil utamanya di daerah Denpasar, Baubau, dan Kabupaten Aru mengantri selama lebih dari dua jam untuk membeli BBM subsidi,” kata Luthfian Haekal, selaku *Human Rights Manager* DFW Indonesia.

Terlebih nelayan kecil yang menjadi responden mengakui tidak memahami alur resmi cara mengakses BBM subsidi. BBM subsidi juga dinilai oleh responden masih belum adil terhadap nelayan kecil. Temuan survei menunjukkan bahwa paling tidak 53,8% responden menyatakan nelayan besar justru mendapatkan akses BBM subsidi. Ketimpangan akses BBM membuat banyak nelayan kecil menginginkan suara mereka didengar serta terlibat dalam pengawasan dalam distribusi BBM

“Perlu peningkatan peran koperasi atau kelompok nelayan dalam akses distribusi, karena sebesar 61,4% responden masih belum tergabung,” terang Haekal.

“Nelayan-nelayan ini disulitkan dengan persyaratan administratif, tetapi untuk mendapatkan stok BBM subsidi ini juga sulit,” kata Zulkarnain Sahi, nelayan asal Gorontalo.

Menanggapi paparan Haekal, Niko dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan bahwa kebocoran subsidi solar meluas hingga sektor di luar perikanan. Kebocoran tersebut utamanya di sektor transportasi. “Kami mendapatkan pandangan dari teman-teman DFW bahwa kebocoran tidak BBM tidak hanya mengalir ke sektor lain, tetapi juga terdapat *middleman* yang mengalirkan ke nelayan-nelayan besar,” papar Niko. Ia pun menambahkan bahwa menurut kajian KNTI, barcode yang digunakan oleh nelayan kecil juga diperjualbelikan di marketplace. Hal tersebut turut menjadi sebab kurangnya subsidi BBM Solar bagi nelayan kecil.

Selain Niko, Panji Setyo Wibowo, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah berusaha untuk memperbaiki sistem distribusi BBM subsidi bagi nelayan kecil. Perbaikan tersebut berupa komunikasi intens antar lembaga seperti Direktorat Kepelabuhanan dan BPH Migas, utamanya berkaitan dengan kartu Kusuka.

“KKP dan BPH Migas sudah bersinergi berkait kemudahan nelayan mendapat subsidi BBM. Sudah ada sinkronisasi data dari Kartu KUSUKA ke aplikasi pertamina,” ucap Panji.



KERJA PAKSA DAN PERDAGANGAN ORANG

Menghantui Pekerja Perikanan

Hubungi layanan pengaduan National Fishers Center jika mengalami hal tersebut



Telepon 0811-9214-141 & 0811-1437-575



Website www.nfc.or.id



E-mail nfc@dfw.or.id

Bergabung di website kami, dan dapatkan informasi terupdate seputar **pekerja perikanan**.

Pekerja Perikanan Kuat, laut Sejahtera

Kami hadir untuk membantu pekerja perikanan melalui informasi, edukasi dan layanan pengaduan yang mudah diakses demi kesejahteraan pekerja yang lebih baik

[Hubungi kami](#)

Informasi Terkini



ABK PERIKANAN:
**JANJI KAYA,
JEBAK UTANG &
DERITA!**

kerja di laut
**TINGGALIN ANAK
ISTRI DEMI
SESUAP NASI**

kerja di laut
**TINGGALIN ANAK
ISTRI DEMI
SESUAP NASI**

Tak Perlu Beribrah Anu
Untuk Mencintai Anu
**SITAKANA
WATKE**

Foto: Fai, Dzulfusi Rafif/ DFW Indonesia



DFW Indonesia, 2025

Disclaimer: Seluruh kegiatan penjangkauan yang dilaksanakan oleh DFW Indonesia dan entitas dibawahnya tidak dipungut biaya apapun.